

**REAKSI ELIT AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK HERMAN
WILLEM DAENDELS PADA BIDANG EKONOMI DI CIREBON
TAHUN 1808-1811**

(Skripsi)

Oleh

RIKA GAYATRI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

REAKSI ELIT AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK HERMAN WILLEM DAENDELS PADA BIDANG EKONOMI DI CIREBON TAHUN 1808-1811

Oleh:

RIKA GAYATRI

Herman Willem Daendels yang di utus Louis Napoleon ke Jawa untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, membuat kebijakan-kebijakan politik pada bidang ekonomi, khususnya di wilayah Cirebon dan menimbulkan reaksi dari elit agama. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian historis. Terdapat langkah-langkah yang dilalui penulis dengan menggunakan metode penelitian historis. Pertama, *Heuristik*, yakni menghimpun jejak-jejak masa lampau (data sejarah). Kedua, *Kritik Sumber*, dengan melakukan kegiatan meneliti sumber-sumber sejarah baik eksternal maupun internal. Ketiga, *Interpretasi*, yaitu penafsiran atas fakta-fakta sejarah yang dikembangkan menjadi kesatuan yang utuh dan bermakna logis. Keempat, *Historiografi*, dalam bentuk karya sejarah. Data-data yang dikumpulkan telah di evaluasi, di verifikasi serta mensintesisakan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi elit agama muncul akibat kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811. Reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811: 1). Reaksi elit agama disebabkan karena penjualan tanah penduduk kepada orang Cina. 2). Reaksi elit agama disebabkan karena keberpihakan pejabat pribumi kepada Belanda. 3. Reaksi elit agama disebabkan karena kebijakan pemerintah Herman Willem Daendels yang menindas, tengah meresahkan masyarakat pribumi Cirebon.

Kata Kunci: Reaksi, Elit Agama, Herman Willem Daendels.

**REAKSI ELIT AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK HERMAN
WILLEM DAENDELS PADA BIDANG EKONOMI DI CIREBON
TAHUN 1808-1811**

Oleh

RIKA GAYATRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **REAKSI ELIT AGAMA TERHADAP
KEBIJAKAN POLITIK HERMAN WILLEM
DAENDELS PADA BIDANG EKONOMI DI
CIREBON TAHUN 1808-1811**

Nama Mahasiswa : **Rika Gayatri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1613033004

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

1. MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Syaiful M, M.Si.
NIP. 196107031985031004


Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199007212019032020

2. MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah


Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP. 196008261986031001


Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198112252008121001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Drs. Syaiful M, M.Si.**



Sekretaris

: **Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Drs. Maskun, M.H.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Maret 2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Gayatri
NPM : 1613033004
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Pendidikan IPS
Fakultas : FKIP UNILA
Alamat : Lebak Danau Kecamatan Jabung Lampung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 16 April 2022.



Rika Gayatri
NPM. 1613033004

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 8 Oktober 1997, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, lahir dari Bapak Atim D. W. dan Ibu In Sunarmi.

Penulis menempuh Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Seputih Raman diselesaikan tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gunung Sugih Kecil diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Jabung diselesaikan pada tahun 2013, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro diselesaikan pada tahun 2016.

Tahun 2016, penulis diterima melalui jalur SNMPTN dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNILA Program Studi Pendidikan Sejarah. Selama menempuh perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan organisasi FOKMA. Pada tahun 2019 penulis mengabdikan diri dalam KKN-PPL FKIP Unila di Pekon Sukarami, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat selama 55 hari.

MOTTO

*JANGAN PERNAH PATAH HARAPAN
JANGAN PERNAH AMPUNI LAWAN
SEBAB KITA BERSAMA TUHAN*

"JAN PIETERSZOOM COEN"
1578-1629

PERSEMBAHAN

DENGAN KERENDAHAN HATI DAN RASA SYUKUR,
KUPERSEMBAHKAN SEBUAH MAHA KARYA INI SEBAGAI
TANDA CINTA, BAKTI DAN KASIHKU KEPADA :

KEDUA ORANG TUAKU BAPAK ATIM D.W DAN IBU IN
SUNARMI YANG TELAH MENEMPA PUTRINYA DENGAN
SETIAP TETES KERINGAT, DARAH DAN AIR MATA, DENGAN
PENUH KASIH SAYANG, PENGORBANAN DAN KESABARAN.
SERTA YANG SELALU MEMBIMBING DAN MENDOAKAN
KEBERHASILAN PUTRINYA, SUNGGUH SEMUA YANG BAPAK
DAN IBU BERIKAN TAK MUNGKIN TERBALASKAN.

ALMAMATER TERCINTA “UNIVERSITAS LAMPUNG”

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi dengan judul “*Reaksi Elit Agama Terhadap Kebijakan Politik Herman Willem Daendels Pada Bidang Ekonomi Di Cirebon Tahun 1808-1811*” adalah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, terima kasih Bapak atas ilmu, bimbingan dan

didikan yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah

7. Bapak Drs. Syaiful M, M. Si., sebagai Pembimbing I skripsi penulis, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Ibu Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., sebagai Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih Ibu atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak Drs. Maskun M.H. selaku Penguji Skripsi Penulis, terimakasih bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang penulis tidak sebutkan satu-persatu, dan para pendidik di Unila pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.
11. Terimakasih kepada keluarga besar HVM 16 atas segalanya.

Bandar Lampung, April 2022

Rika Gayatri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang dan Masalah	1
1.2.Identifikasi Masalah	3
1.3.Batasan Masalah.....	4
1.4.Rumusan Masalah	4
1.5.Tujuan Penelitian	4
1.6.Manfaat Penelitian	4
1.7.Kerangka Pemikiran.....	5
1.8.Paradigma.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1.Tinjauan Pustaka	6
2.1.1. Teori Reaksi	6
2.1.1.1.Konsep Reaksi.....	6
2.1.1.2.Bentuk-Bentuk Reaksi	6
2.1.1.3. Faktor Pendorong Reaksi	7
2.1.2.Elit Agama.....	7
2.1.3.Kebijakan Politik.....	17
2.1.4.Herman Willem Daendels	19
2.1.5.Teori Konflik.....	20
2.1.5.1. Jenis-Jenis Teori Tentang Konflik	22
2.1.5.2. Penyebab Konflik.....	25
2.1.5.3. Tokoh-Tokoh Teori Konflik	28

III. METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian	36
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	37
3.3. Metode Penelitian.....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5. Teknik Analisis Data.....	46
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Hasil	48
4.1.1. Gambaran Umum Kota Cirebon	48
4.1.2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Cirebon Tahun 1808-1811.....	51
4.1.3. Deskripsi Data	56
4.1.3.1. Kebijakan Politik Herman Willem Daendels Pada Bidang Ekonomi Di Cirebon Tahun 1808- 1811	56
4.1.3.2. Reaksi Elit Agama Terhadap Kebijakan Politik Herman Willem Daendels Pada Bidang Ekonomi Cirebon Tahun 1808-1811	63
4.2. Pembahasan.....	70
4.2.1. Reaksi Elit Agama Terhadap Kebijakan Politik Herman Willem Daendels Di Cirebon Tahun 1808-1811.....	71
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1. Simpulan	76
5.2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbedaan Antara Kelas Penguasa Dan Elite.....	8
2. Kegiatan Penelitian Skripsi.....	36
3. Wilayah Administrasi Kota Cirebon.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Cirebon Dalam Peta Jawa Barat.....	49
2. Peta Administrasi Kota Cirebon.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Raden Dipati Natadireja Kepada Daendels 25 Juli 1808 yang melaporkan tentang Bagus Rangin, Lembar Pertama	87
2. Surat Raden Dipati Natadireja Kepada Daendels 25 Juli 1808 yang melaporkan tentang Bagus Rangin, Lembar Kedua	88
3. Surat Raden Dipati Natadireja Kepada Daendels 25 Juli 1808 yang melaporkan tentang Bagus Rangin, Lembar Ketiga.....	89
4. Surat Raden Dipati Natadireja Kepada Daendels 25 Juli 1808 yang melaporkan tentang Bagus Rangin, Lembar Keempat	90
5. Arsip Surat-Surat Sir Thomas Stamford Raffles yang berterimakasih kepada Pangeran Prangwedono, Pangeran Surianagara dan Pangeran Suriadipura yang telah membantu Inggris meredam perlawanan Bagus Rangin Di Cirebon	91
6. Arsip Surat-Surat Sir Thomas Stamford Raffles yang berterimakasih kepada Pangeran Prangwedono, Pangeran Surianagara dan Pangeran Suriadipura yang telah membantu Inggris meredam perlawanan Bagus Rangin Di Cirebon. Tanggal 20 Februari 1812 Lembar Pertama	92
7. Arsip Surat-Surat Sir Thomas Stamford Raffles yang berterimakasih kepada Pangeran Prangwedono, Pangeran Surianagara dan Pangeran Suriadipura yang telah membantu Inggris meredam perlawanan Bagus Rangin Di Cirebon Lembar Kedua	93
8. Arsip Surat-Surat Sir Thomas Stamford Raffles yang berterimakasih kepada Pangeran Prangwedono, Pangeran Surianagara dan Pangeran Suriadipura yang telah membantu Inggris meredam perlawanan Bagus Rangin Di Cirebon Lembar Ketiga	94

9. Arsip Surat-Surat Sir Thomas Stamford Raffles yang berterimakasih kepada Pangeran Prangwedono, Pangeran Surianagara dan Pangeran Suriadipura yang telah membantu Inggris meredam perlawanan Bagus Rangin Di Cirebon Lembar Keempat95
10. Arsip Surat-Surat Sir Thomas Stamford Raffles yang berterimakasih kepada Pangeran Prangwedono, Pangeran Surianagara dan Pangeran Suriadipura yang telah membantu Inggris meredam perlawanan Bagus Rangin Di Cirebon Lembar Kelima96
11. Arsip Surat-Surat Sir Thomas Stamford Raffles yang berterimakasih kepada Pangeran Prangwedono, Pangeran Surianagara dan Pangeran Suriadipura yang telah membantu Inggris meredam perlawanan Bagus Rangin Di Cirebon. Tanggal 6 Maret 1812.....97

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daendels ditugaskan ke Jawa menjadi Gubernur Jenderal seiring dengan kebangkrutan VOC yang diambil alih oleh Pemerintah Belanda, Karesidenan Cirebon telah mengalami beberapa kali reorganisasi. Peraturan tersebut mengatur tentang *perfect*, Sultan-Sultan, patih, iuran, rodi dan kewajiban anak negeri, polisi, pembuatan jalan, dan dinas pos. Selain itu peraturan tersebut menetapkan bahwa seluruh kekuasaan politik para Sultan di Cirebon telah dicabut, baik Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan tidak memiliki kekuasaan lagi, dan kedudukan mereka diubah menjadi pegawai pemerintah.

Daendels dalam menjalankan pemerintahannya menerapkan sistem modern bersifat sentralistis. Daendels ingin memerintah rakyat secara langsung tanpa perantara Bupati atau Sultan. Oleh karena itu, Herman Willem Daendels menurunkan kedudukan Bupati dan Sultan. Bupati dan Sultan ditetapkan sebagai pegawai tinggi pemerintah kolonial dan mendapat gaji. Namun demikian, mereka tetap berkuasa di daerah masing-masing. Dengan kata lain, Herman Willem Daendels mensejajarkan kedudukan Bupati dengan Sultan (Hardjasaputra, 2011:133).

Herman Willem Daendels mengambil alih pemerintahan Keraton Kanoman setelah Belanda pergi, Herman Willem Daendels secara terus menerus mengurangi kekuasaan Sultan, yang mengakibatkan perlawanan rakyat yang sempat mereda kembali meluas. Untuk mencoba meredakan perlawanan rakyat, Herman Willem Daendels mengembalikan raja

Kanoman yang dibuang oleh Gubernur Jenderal A. H Wiese (1805-1808) dari Ambon dan menobatkannya sebagai Sultan Cirebon. Tidak berselang lama Herman Willem Daendels kembali memecat Sultan Kanoman yang sikap dan tindakannya dianggap selalu menentang Pemerintah Kolonial. Pemecatan terhadap Sultan Kanoman membuat rakyat Cirebon sangat kecewa, karena Sultan Kanoman dianggap sebagai figur pemimpin yang selalu membela rakyat. Keadaan tersebut membuat masyarakat menjadi resah (Supramono, 2008:46-47).

Ketidakpuasan rakyat, terutama kalangan santri kemudian menimbulkan perlawanan yang berpusat di sekitar daerah Ciwaringin dan Cirebon tengah dilanda suatu perlawanan rakyat yang cukup besar. Gerakan perlawanan rakyat merupakan reaksi terjajah terhadap dominasi penguasa yang menimbulkan berbagai perubahan sosial. Karena dalam sistem kolonisasi tidak terdapat lembaga-lembaga untuk menyalurkan perasaan tiak puas, maka jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan gerakan sosial sebagai protes sosial.

Gerakan protes tersebut seringkali diperkuat oleh perasaan keagamaan dan berkembang menjadi gerakan sosial politik. Bagi kalangan tasawuf, penghambaan manusia hanya terjadi ketika manusia mesti menghambakan diri terhadap tuhan (Rahayu, 2016:149). Elit agama di Cirebon memberikan reaksi terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels di Cirebon. Hal demikian yang kemudian menempatkan kiai menjadi aktor utama penggerak perlawanan terhadap Herman Willem Daendels. Mereka membuat bingkai keagamaan untuk menggerakkan massa. Mereka bereaksi dengan alasan kebijakan pemerintah Cirebon pada saat itu tidak berpihak kepada masyarakat. Dalam sistem sosial tradisional-agraris dimana agama memainkan peranan yang cukup dominan, elit agama dengan mudah menempati kedudukan sebagai pemimpin dengan memberi warna keagamaan ke dalam gerakan perlawanan.

Peran elit agama dalam gerakan sosial telah mendapat banyak perhatian dalam literatur ilmu politik. Politik perlawanan yang melibatkan pemuka agama seperti haji, kiai, pendeta dan sebagainya biasanya tampil dalam bentuk-bentuk masyarakat tradisional dimana agama memiliki peran penting di tengah masyarakat. Pemuka agama memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam masyarakat pedesaan. Mereka tidak mesti memiliki wewenang politik atau menduduki jabatan tertentu dalam struktur politik lokal. Namun kekuatan kharismatik yang dimiliki pemuka agama inilah yang kemudian memiliki arti penting bagi masyarakat yang berada di lingkungan pesantren.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Reaksi Elit Agama Terhadap Kebijakan Politik Herman Willem Daendels Pada Bidang Ekonomi Di Cirebon Tahun 1808-1811”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka identifikasi madalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang administrasi di Cirebon tahun 1808-1811?
2. Bagaimanakah reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang birokrasi di Cirebon tahun 1808-1811?
3. Bagaimanakah reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811.

1.6 Manfaat Penelitian

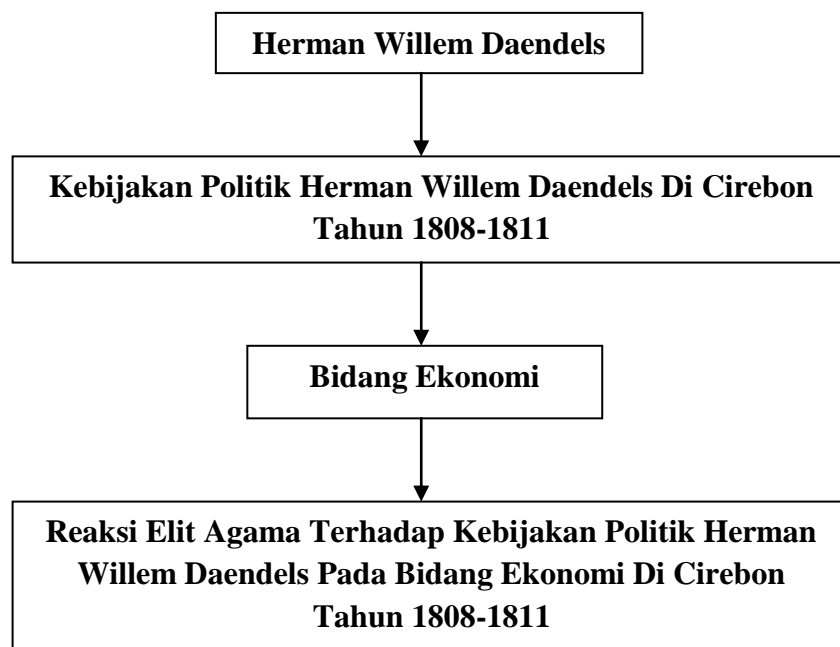
1. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sejarah pada khususnya mengenai reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811.
2. Menambah wawasan peneliti khususnya dalam bidang kesejarahan yakni mengenai Indonesia pada masa kolonialisme khususnya mengenai reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811.

1.7 Kerangka Pemikiran

Setelah transisi dari VOC ke Herman Willem Daendels, Herman Willem Daendels mulai melaksanakan tugasnya di Jawa yang telah diemban dari Raja Louis Bonaparte. Herman Willem Daendels membuat kebijakan politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan pemerintahannya, kebijakan yang dibuat dalam penelitian ini adalah pada bidang ekonomi. Kebijakan politik pada bidang ekonomi inilah yang berpengaruh besar memantik reaksi elit agama di Cirebon.. Kebijakan politik pada bidang ekonomi yang berdampak langsung pada keadaan sosial ekonomi di Cirebon memicu reaksi dari Elit Agama di Cirebon yang berujung pada konflik.

1.8 Paradigma

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Reaksi

2.1.1.1 Konsep Reaksi

Soemanto (1998:26) mengartikan respon yang berarti tanggapan, yang merupakan serapan yaitu apa yang diterima oleh panca indra, bayangan dalam angan-angan, pendapat, pandangan, sambutan dan reaksi. Reaksi atau respon dalam Kamus Sosiologi Antropologi adalah aktifitas atau tanggapan (reaksi) terhadap suatu kondisi (stiusasi stimulus) dimana kondisi itu harus dihadapi (Yacub, 2001:134). Respon diartikan sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu (Soekanto, 1993:328).

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang reaksi dapat digarisbawahi bahwa reaksi merupakan perilaku yang memberi tanggapan yang diterima oleh panca indera terhadap suatu kondisi tertentu dan harus dihadapi.

2.1.1.2 Bentuk-Bentuk Reaksi

Wirawan (2002:97) berpendapat, respon/reaksi memiliki dua model yaitu:

1. Respon Positif

Respon dikatakan positif apabila masyarakat mempunyai tanggapan-tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi atau mendukung suatu kejadian.

2. Respon Negatif

Respon dikatakan negatif apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi dimana mereka dengan tidak ikut berpartisipasi atau mendukung suatu kejadian.

2.1.1.3 Faktor Pendorong Reaksi

Hakikatnya reaksi muncul karena terdapat aksi pemicu yang menyebabkan suatu kolektif melakukan sebuah reaksi atau respon terhadap aksi tersebut. Dalam kehidupan sosial terdapat faktor pendorong reaksi yang dikenal dengan istilah anomie. Teori anomie berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga ada individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang (Masitoh, 2018:14). Reaksi negatif yang bersifat radikal dapat memicu pada sebuah perlawanan. James Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditunjukkan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinate terhadap mereka (Masitoh, 2018:16).

2.1.2 Konsep Elit Agama

Pengaruh Agama dalam suatu gerakan juga terlihat dalam gerakan kemerdekaan melawan penjajahan, gerakan-gerakan anti kolonialisme ini terinspirasi dari para elite (Gunawan, 2020:26). Elite merupakan sekumpulan orang yang terbatas dengan posisi strategis. Elite hadir bukan dari ruang hampa atau sebuah persembahan cek kosong. Walaupun pada kenyataannya masyarakat memberikan mandat tanpa kontrak, namun secara sosiologis, hal tersebut merupakan rangkaian dari konsekuensi eksistensi dan interaksi sosial yang menghantarkan mereka pada puncak-puncak struktur sosial. Keberadaan elite karena adanya kaum alit yang dalam seluruh keterbatasannya mempertaruhkan harapannya untuk

kebersamaan dalam lingkup negara bangsa (Ihsan, Nurhayati, 2020:41). Konsep elite pertama kali digunakan untuk menyatakan “bagian yang menjadi pilihan atau bunga” dari barang-barang yang ditawarkan untuk dijual sebagai tanda obyek-obyek yang dijual tersebut mempunyai nilai pilihan. Istilah elite berasal dari kata *eligere*, yang berarti memilih. Dalam perkataan biasa, kata *eligere* berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Dalam ilmu-ilmu sosial, tekanan telah bergeser dari pilihan menjadi terkemuka. Istilah ini digunakan secara luas pada tahun 1930-an di Inggris dan Amerika Serikat melalui teori-teori sosiologi tentang elite. Dalam sejarahnya, jumlah elite cenderung lebih sedikit akibat legitimasi dari masyarakat demikian berat (Keller, 1984:3). Dalam arti yang paling umum, elite menunjuk pada sekelompok orang yang di dalam masyarakat menempati kedudukan-kedudukan tinggi (Schoorl, 1980:128). Hampir sama dengan pengertian tersebut, elite dirumuskan sebagai kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kedudukan sosial di atas para warga masyarakat lainnya (Rauf, 1987:14). Lebih jauh, dalam membahas persoalan elite, maka harus dibedakan dengan kelas penguasa. Perbedaan antara kelas penguasa dan elite adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Perbedaan Antara Kelas Penguasa Dan Elite

Kriteria Komparatif	Kelas Penguasa	Elite
Jumlah	Satu	Beberapa
Ukuran	Besar	Kecil, Berpusat
Tenggang Waktu	Lebih Lama Hidupnya	Tidak Lama
Cara Masuk	Kelahiran Dan Kekayaan	Keahlian
Cara Keluar	Hilangnya Kekayaan	Ketidakmampuan
Ruang Lingkup Otoritas	Menyebar Dan Luas	Khusus Dan Terbatas
Ikatan Kebudayaan Pendidikan Sekolah	Latar Belakang	Tidak Dikhususkan
Kesempatan	Relatif Tertutup	Relatif Terbuka

Sumber: Keller, Penguasa dan Kelompok, 1984:83.

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa jumlah kelas penguasa hanya satu, sementara jumlah elite lebih dari satu, sebab elite bukanlah suatu kelas yang homogen. Akan tetapi, suatu aliansi heterogenitas yang diikat oleh suatu kepentingan. Kelas penguasa merupakan suatu kelas tersendiri sehingga ukurannya relatif besar. Sementara itu, ukuran elite adalah kecil dan berpusat (Keller, 1984:83).

Dilihat dari tenggang waktunya, kelas penguasa lebih lama keberadaannya. Hal ini disebabkan kelas penguasa merupakan agregasi dari segala aspek kepentingan, baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan seterusnya, sehingga relatif mandiri dan berlangsung terus-menerus. Sedangkan keberadaan elite tidak berlangsung lama. Hal ini karena yang mendorong faktor munculnya elite adalah faktor yang temporal. Cara masuk ke dalam kelas penguasa adalah genealogi dan kekayaan. Tanpa punya dua syarat tersebut sulit untuk bisa masuk ke dalam lingkaran kelas penguasa. Sementara untuk masuk ke dalam elite adalah atas dasar keahlian. Tanpa ada keahlian seseorang akan sulit menembus ke dalam elite. Seseorang akan terlempar dari lingkaran kelas penguasa manakala ia tidak lagi mempunyai kekayaan. Sebaliknya, seseorang akan keluar dari elite manakala sudah tidak mampu lagi atau tidak lagi mempunyai kapabilitas. Otoritas yang dimiliki kelas penguasa sangat luas dan menyebar, sebab merupakan sebuah kelas yang menguasai banyak aspek kehidupan sehingga secara struktural kelas penguasa sangat kuat kedudukannya. Sebaliknya, elite hanya mempunyai otoritas dalam hal tertentu atau bersifat khusus dan terbatas dalam satu hal saja (Yusron, 2009:67).

Kelas penguasa sebagai sebuah kelas yang secara struktural sangat berkuasa, wajar apabila mempunyai sebuah standar khusus yang harus dimiliki oleh anggota kelasnya. Hal itu misalnya soal pendidikan sekolah. Biasanya kelas penguasa menjadikan latar belakang pendidikan sekolah sebagai lambang keistimewaannya, yang dapat digunakan untuk membedakan dengan kelas lainnya. Karena kelas penguasa memang

mempunyai akses ke sana. Hal tersebut tidak dapat dijumpai di elite yang menjadi penentu. Sebagai sebuah agregasi yang terbentuk karena suatu hal, maka latar belakang pendidikan tidak dikhususkan. Dalam hal latar belakang pendidikan sekolah, elite lebih longgar dibandingkan dengan kelas penguasa. Oleh sebab itu, kesempatan untuk masuk ke dalam kelas penguasa relatif tertutup untuk publik karena adanya beberapa kualifikasi seperti tersebut. Akan tetapi, kesempatan untuk masuk ke dalam elite relatif lebih terbuka karena persyaratan yang ditetapkan tidak seketat kelas penguasa. Di samping itu, kelompok elite biasanya juga didefinisikan sebagai anggota-anggota kelompok kecil dari suatu masyarakat, yang dihormati, disegani, kaya dan mempunyai kekuasaan. Mereka adalah kelompok minoritas superior pada tingkat atas dari susunan masyarakat, yang memiliki kemampuan untuk mengontrol kegiatan ekonomi dan dalam beberapa hal mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan (Yusron, 2009:68).

Maka, mudah untuk memahami bahwa di dalam beberapa hal kelompok ini tidak hanya ditempatkan sebagai orang yang memberikan legitimasi, tapi lebih dari itu mereka orang yang berkarakter moral mampu bertindak secara menentukan dan selalu diharapkan bisa mengambil tindakan yang tepat demi kemaslahatan umum. Sementara itu, kelompok mayoritas diatur dan dikuasai oleh elite serta dipandang sebagai massa. Mereka adalah kelompok yang posisinya lemah. Mereka tidak mampu mengontrol, baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan publik, dan tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan (Yusron, 2009:68). Berbagai rumusan seperti diuraikan di atas, pada prinsipnya sejalan, yakni pengertian elite menunjuk pada sejumlah orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan sosial yang lebih tinggi. Adapun dalam tulisan ini, pengertian elite agama sebagaimana gagasan La Ode Abdul Rauf, menunjuk pada sejumlah orang yang berpengaruh, prestise dan peranannya dalam hal sosial keagamaan melebihi warga masyarakat lainnya. Sehingga menempati kedudukan-kedudukan yang lebih tinggi (Rauf, 1987:11).

Keller, menyatakan bahwa elite agama pada suatu waktu merupakan pengadil tertinggi dari pikiran dan perbuatan manusia. Malah sampai kini pengaruh elite agama, walau tak langsung, tidak berhenti. Elite agama termasuk elite penentu karena mereka sama-sama bertanggung jawab untuk dapat bertahan bersama-sama (Keller, 1984:406). Pareto berpendapat, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran-kehadiran mereka pada kekuasaan politik yang penuh. Mereka bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah mereka yang terbaik. Merekalah yang mampu menduduki kekuasaan tertinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang yang kaya juga pandai dan mempunyai kelebihan dari masyarakat kebanyakan (Amin, 2017:170). Komunitas agama juga tidak lepas dari adanya stratifikasi sosial sebagaimana pendapat Pareto, yaitu kelompok elite atau non elite. Dan ketika elite yang dimaksud adalah dalam masyarakat agama, maka yang muncul adalah tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan lebih dalam masalah agama (Koentjaraningrat dalam Toha, 2019:5). Elite agama (ulama) adalah yang menguasai bidang-bidang yang secara konvensional disebut bidang agama, seperti fikih, kalam dan falsafah. Singkatnya, apabila membicarakan tentang elite pada komunitas agama, maka yang muncul adalah *kiai, nyai, ajengan, tuan guru, bagus atau gus, bindere, lora, ning, shekh, habib, ustadh, buya, to fanrita* (Mughni dalam Toha, 2019:5).

Dalam masyarakat Islam, sebenarnya sebutan yang paling umum bagi golongan ahli pengetahuan Islam adalah ulama, Jamak dari alim artinya orang Islam yang memiliki ilmu pengetahuan mendalam tentang Agama Islam. Namun biasanya di kalangan masyarakat Islam Jawa Tengah, Jawa Timur termasuk Madura, sebutan bagi ulama tradisional adalah *kiai* atau *nyai*. Sedangkan putranya disebut *gus, bindere, lora* atau *ning* untuk yang perempuan. Di Jawa Barat, ulama dikenal dengan *ajengan*. *Tuan guru, tuan shekh* atau *buya* biasanya untuk ulama di Sumatra, Nusa Tenggara

Barat dan luar Jawa lainnya. Bagi kalangan Islam modernis dan kalangan masyarakat Arab di Indonesia, para ulama ini dipanggil *ustadh*. Istilah *kiai* sekarang ini telah digunakan secara generik bagi semua ulama, baik tradisional maupun modernis di Pulau Jawa atau di luar Jawa. Begitu juga istilah *ustadz*, kini tidak hanya digunakan di kalangan Islam modernis atau kalangan masyarakat Arab saja, akan tetapi telah masuk ke dunia pesantren tradisional. Menurut Ziemek, terdapat beberapa faktor yang mendorong lahirnya ulama yaitu: Pertama, berasal dari keluarga ulama di lingkungan masyarakatnya. Kedua. Sosialisasi dan proses pendidikannya dalam suatu pesantren terpadang, yang dilengkapi dengan pengalaman dan latar belakang kepemimpinan yang telah ditanamkan. Ketiga, Adanya kesiapan pribadi yang tinggi untuk bertugas, yakni berupa kemauan untuk mengabdikan kehidupan pribadinya demi tugas di pesantren. Keempat. Sebagai pemimpin agama dan masyarakat, ulama harus memiliki kharisma sehingga mampu meyakinkan masyarakat untuk bekerja secara sukarela dalam membangun dan mendanai pesantren. Kelima. Mampu menghimpun dana dan bantuan tanah wakaf dari masyarakat berada (Ziemek dalam Toha, 2019:6).

Dalam masyarakat tradisional khususnya di Jawa, ulama lebih dikenal dengan sebutan *kiai*. Seseorang dipanggil *kiai* atau menjadi *kiai* karena orang tersebut diterima masyarakat sebagai *kiai*, mungkin karena bisa dimintai nasehat atau mempunyai santri banyak dan lain sebagainya, bukan karena persyaratan formal seperti studi atau ijazahnya. Walaupun persyaratan formal tidak dibutuhkan, namun ada beberapa persyaratan non formal yang harus dipenuhi untuk menjadi *kiai* yaitu: pengetahuannya dan keshalehannya (Atjeh dalam Toha, 2019:6). *Kiai* di Jawa kebanyakan tinggal didaerah pedesaan, namun *kiai* merupakan bagian dari kelompok elite dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat Jawa. *Kiai* yang memimpin pesantren besar merupakan bagian dari elite nasional, *kiai* yang memimpin pesantren sedang, merupakan bagian dari elite tingkat propinsi, sedangkan *kiai* yang memimpin pesantren kecil merupakan bagian dari elite kabupaten. Namun demikian apa yang dikatakan Dhofier

(Toha, 2019:6) di atas, bukanlah suatu yang pasti karena tidak jarang kiai yang mempunyai santri sedikit dengan pondok yang kecil, justru lebih menasional dibandingkan kiai yang mempunyai beribu-ribu santri.

Kiai merupakan gelar terhormat di kalangan masyarakat Islam tradisional, namun sebaliknya ada kalangan tertentu yang berusaha menghindari sebutan kiai bagi sosok elite agamanya, bahkan menyatakan sebutan kiai perlu dihapus dari terminologi Islam, supaya Islam tidak dikotori dengan pemahaman-pemahaman yang tidak jelas, karena sebenarnya apa yang disebut dengan kiai tidak lain hanyalah dukun belaka. Sehingga sebutan kiai harus diganti dengan sebutan yang lebih tepat dengan alasan karena tidak ada kitab rujukan yang baku untuk digunakan meluruskan perilaku negatif kiai, sementara itu kalau sebutan ulama, maka banyak kitab atau buku yang dapat dijadikan panduan untuk meluruskan tingkah buruk ulama atau ulama su' (Jaiz dalam Toha, 2019:7).

Elite komunitas agama di Indonesia jika ditinjau sejarahnya pada abad-abad lalu, terbagi menjadi dua kelompok, Pertama, Para pegawai yang pada umumnya menjabat penghulu, bertugas mengurus masjid di kota-kota besar dan menjabat sebagai anggota pengadilan agama, serta merangkap sebagai penasehat agama pada pengadilan umum. Kedua, Para guru agama, kiai atau shekh, sebutan untuk guru yang tua dan dihormati dalam lingkungan yang lebih luas. Adapun bila dikaji pada strukturnya, pegawai agama (kiai pengulu) sifatnya Hirarki karena diangkat dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, atas usulan Bupati dan residen, sedangkan gajinya berasal dari pemerintah, sehingga akar para pegawai agama terdapat dalam kalangan pemerintah kolonial Belanda. Sebaliknya struktur pada kelompok kiai atau guru agama, tidak begitu hirarki sebagaimana kiai penghulu serta tidak mendapat gaji dari pemerintah (Steenbrink dalam Toha, 2019:7). Sedangkan menurut istilah Qoyim (Toha, 2019:7), golongan yang pertama dikenal dengan ulama pejabat yang berhubungan dan menerima gaji dari pemerintah Belanda yang tugasnya berada dalam jalur *at-tasyri' wa al-qadla'*, yaitu pelaksana

bidang kehakiman yang menyangkut shariat Islam. sedangkan yang kedua dikenal dengan ulama bebas yang biasanya berada di pondok pesantren yang sekaligus berfungsi sebagai *mubaligh* (juru dakwah) dan biasanya anti terhadap pemerintah Belanda, dan mengambil posisi di jalur *ad-da'wah wa at-tarbiyah* yaitu dakwah dan pendidikan.

Kuntowijoyo yang melakukan penelitian di Madura dalam salah satu bahasannya mengupas tentang elite masyarakat agama, mengatakan bahwa kiai adalah elite desa yang karena dalamnya pemahaman agamanya sehingga masyarakat menempatkan mereka pada strata golongan yang paling terdidik di setiap desa. Dijelaskan pula bahwa, beberapa kiai selain karena keahliannya dalam masalah agama, mereka juga dapat meramal nasib, menyembuhkan orang sakit, dan mengajarkan olah kanuragan (kedigdayaan). Dengan pembagian yang lebih detail, kiai dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: guru ngaji yang mengajarkan membaca al-Qur'an, guru ngaji kitab yang mengajarkan berbagai jenis buku agama, dan guru tarekat atau pemimpin tarekat. Dijelaskan pula, di desa-desa, peranan guru ngaji atau kiai tampak pada tradisi keagamaan yang dilaksanakan berdasarkan penanggalan. Kehadiran kiai amat diperlukan dalam kenduri malam Jum'at untuk memperingati orang yang telah meninggal dunia, *slametan*, seperti dalam memperingati pendiri Tarekat *Qadiriyyah*, dan tajin sora (pesta makan bubur dalam bentuk bubur beras) pada bulan muharram atau bulan asyura. Selain itu kiai juga memimpin ritual keagamaan yang lebih menduniawi, seperti rokat desa (tradisi bersih desa), rokat bandaran atau rokat tasik (ritual tradisi nelayan), serta slametan pada waktu pembuatan dan peluncuran perahu (Kuntowijoyo dalam Toha, 2019:8).

Noer (Toha, 2019:8) mengatakan, di beberapa kalangan masyarakat Jawa memberikan penghormatan yang tinggi kepada kiai merupakan kewajiban utama sebagaimana penghormatannya pada orang tua, mertua, dan raja. Agaknya kedudukan dan penghormatan seperti ini merupakan kelanjutan dari tradisi pra-Islam (animisme) yang memberikan penghormatan luar

biasa kepada dukun atau tokoh adat (pembaca mantra) yang mempunyai ilmu supranatural, maka tidak heran kemudian jika seorang kiai tidak saja hanya memiliki kematangan dan kedalaman dalam ilmu Agama Islam, tapi lebih dari itu juga dianggap tokoh yang menguasai ilmu supranatural. Kedudukan yang dimuliakan ini tetap hingga hari tuanya, malahan tidak jarang terjadi, hingga wafat pun pengaruhnya tidak pupus.

Kedudukan dalam Kiai dibedakan menjadi empat kelompok kiai yang didasari dari adanya sikap kiai terhadap masalah sosial, politik, ekonomi dan pendidikan. Pertama, kiai spiritual, yang dimaksud pada kelompok yang pertama ini adalah kiai yang memfokuskan gerakannya pada kegiatan mengajar di pesantren dan berkonsentrasi pada peribadatan. Kedua, kiai advokasi, yang tergolong kelompok ini adalah seorang kiai disamping aktif mengajar di pesantren, juga memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat. Ketiga, kiai politik adaptif, yaitu kiai yang memiliki kepedulian dengan organisasi politik dan kekuasaan serta memiliki kedekatan dengan pemerintah. Keempat, kiai politik mitra kritis, yakni kiai yang memiliki kepedulian terhadap organisasi politik, namun kritis terhadap pemerintah. Ulama adalah sebutan yang paling umum bagi elite masyarakat santri. Kata ini berasal dari bahasa Arab, artinya orang yang senantiasa takwa (takut) kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, (35:28):

”Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya, hanyalah ulama”

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa ulama adalah hamba-hamba Tuhan yang hanya takut kepada-Nya, serta hanya beribadah menurut perintah-Nya dan memberikan petunjuk, bimbingan pada masyarakat sesuai ajaran agama. Selain itu ulama merupakan teladan dalam beribadah, serta figur yang layak dicontoh dalam menggapai pengetahuan makrifat (status dalam pengetahuan sufi yang tertinggi), dan mengajarkan bagaimana memperpendek jarak diri dengan Tuhan (Horikoshi dalam Toha, 2019:8).

Shihab (Toha, 2019:8) merinci tugas utama yang harus ditunaikan ulama sebagaimana tugas kenabian dalam mengembangkan kitab suci, antara lain: Pertama. Menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajarannya sesuai dengan perintah Allah (Al-Qur'an, 5:67). Kedua, menjelaskan tentang ajaran-ajaran-Nya (Al-Qur'an, 16:44). Ketiga, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat (Al-Qur'an, 2:213). Muchtar mengemukakan identitas atau persyaratan pokok bagi seseorang yang disebut ulama, antara lain:

1. Pertama, pengalaman ilmu yang diimban. Seorang ulama, selain mengimban ilmu yang bermanfaat sekaligus harus menjadi pelaksana ilmu itu. Serta setiap perbuatan dan tingkah lakunya tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan berdasarkan ilmu tersebut.
2. Kedua, penyiaran ilmu yang diimban. Seorang ulama harus mempunyai komitmen terhadap tugas menyiarkan dan memasyarakatkan ilmunya untuk memberikan informasi, bimbingan dan tuntunan pada masyarakat.
3. Ketiga. Tunduk sepenuhnya pada al-Qur'an. Dasar pertimbangan seorang ulama dalam bersikap dan bertindak adalah tuntunan Allah dan Rasul-Nya, menerima dengan puas semua keputusan berdasarkan agama.
4. Keempat. Kesadaran terhadap kepastian terjadinya janji dan ketentuan Allah. Kesadaran ini mendorong untuk selalu ingat tanggung jawab sebagai ulama, sehingga selalu lebih memperhatikan pada hak yang pasti diperoleh. Sikap ini menjadikan seorang ulama selalu merasa terpanggil untuk melibatkan diri dalam usaha-usaha mengatasi setiap persoalan yang dihadapi masyarakatnya.
5. Kelima. Bersikap *tawadlu'* dan rendah hati. Pemahaman dan penghayatan yang dimiliki seorang ulama tentang tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah, baik yang bersifat *Qur'aniyah* maupun yang bersifat *Kauniyah*, menyadarkan akan keterbatasan dan kelemahan dirinya dihadapan Allah, sehingga membuatnya bersikap rendah hati, tidak sombong, bersedia menghargai dan menghormati pendapat orang

lain yang berbeda, merasa lebih patut menghormati orang lain dari pada dihormati, serta melandasi setiap sikap dan perbuatannya dengan keikhlasan, semata-mata mencari keridlaan Allah (Toha, 2019:10).

Nahdatul Ulama, memberikan kriteria ulama sebagai berikut: Pertama. Norma pokok yang harus dimiliki seorang ulama adalah ketakwaan kepada Allah. Kedua. Seorang ulama mempunyai tugas utama mewarisi misi (risalah) Rasulullah meliputi: ucapan, ilmu, ajaran, perbuatan, tingkah laku, mental dan moralnya. Ketiga. Seseorang disebut ulama apabila memiliki ciri-ciri utama dalam kehidupan sehari-hari seperti, tekun beribadah (baik yang wajib maupun yang sunnah), zuhud (melepaskan diri dari urusan dan kepentingan materi duniawi), mempunyai ilmu akhirat (ilmu agama dalam kadar yang cukup), mengerti kemaslahatan umat (peka terhadap kepentingan umat), dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah dengan didasari niat yang benar, baik dalam berilmu maupun beramal (Siddiq dalam Toha, 2019:11).

Berdasarkan beberapa pernyataan ahli di atas, dapat digarisbawahi bahwa elit agama adalah sekelompok orang dalam lapisan masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tinggi dan memiliki kelebihan dalam bidang-bidang yang secara konvensional disebut bidang agama.

2.1.3 Kebijakan Politik

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiardjo, 2008:20). Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat,
2. Terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan
4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan (Muhadjir, 2000:15).

Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (*city*) (Wehrich dan Koontz, 1993:123). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Joyce C. Mitchell berpendapat, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya (*politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society*) (Mitchell dan Mitchell, 1969:4-5). Sedangkan menurut Karl W. Deutsch, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (*politics is the making of decision by public means*) (Deutsch, 1972:3). Dikatakan selanjutnya bahwa keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan pribadi oleh seseorang dan bahwa keseluruhan dari keputusan semacam itu merupakan sektor umum atau sektor publik (*public sector*) dari suatu negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai (*public goods*), yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa. Dalam arti ini politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah. Oleh Deutsch dan kawan-kawan negara dianggap sebagai kapal, sedangkan pemerintah bertindak sebagai nakhodanya (Budiardjo, 2008:20).

Berdasarkan definisi kebijakan dan definisi politik yang telah disebutkan beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah hal-hal yang dirumuskan oleh pemerintah yang menyangkut peraturan yang akan diberlakukan untuk masyarakat dalam suatu negara. Sedangkan politik adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan agar mampu untuk merumuskan dan menegakkan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan untuk masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan politik adalah hal-hal yang dirumuskan pemerintah menyangkut administrasi, birokrasi dan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin untuk rakyat dalam daerah kekuasaannya.

2.1.4 Herman Williem Daendels

Herman Willem Daendels, mantan Komandan Divisi II *Legion Etrangere* dan Panglima Angkatan darat Republik Batavia merupakan Marsekal non-Perancis yang ditugaskan oleh Napoleon Bonaparte untuk menguasai Jawa berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda Louis Napoleon Tertanggal 29 Januari 1807 yang mengemban dua tugas utama, yakni menyelamatkan Jawa dari serangan Inggris dan membenahi sistem administrasi pemerintahan di wilayah koloni. Beberapa hari sebelum keberangkatannya ke Jawa, pada tanggal 14 Februari 1807 Herman Willem Daendels yang semula berpangkat militer Kolonel Jenderal dinaikkan pangkatnya menjadi Marsekal oleh Louis Napoleon (Marihandono, 2004:6-7).

Herman Willem Daendels merupakan mantan pimpinan Legiun Batavia bagi republik Prancis, yang telah menunjukkan kualitas militer tinggi dan kesetiannya kepada Kaisar Napoleon Bonaparte pada tanggal 28 Januari 1807 “yang karakter energiknya, bakat militer dan administrasinya membenarkan beliau dipilih” dilantik sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Komandan Tertinggi Angkatan Darat Dan Laut Perancis di bagian barat Tanjung Harapan (Santosa, Rocher, 2013:14).

Carey (2011:183) menyebutkan bahwa Herman Willem Daendels adalah seseorang yang benar-benar merupakan produk Eropa baru ditempa oleh Revolusi Perancis. Ahli hukum, revolusioner, politikus, dan serdadu profesional, Daendels telah terlibat dalam Patriot Pemberontak 1786-1787 melawan negara Belanda. Herman Willem Daendels juga ikut bertempur dipihak angkatan bersenjata Republik Prancis dalam serbuan ke negeri Belanda. Kemudian, sebagai ketua Partai Unitaris yang pro-Prancis, Herman Willem Daendels menjadi terkenal sebagai seorang yang berwatak kepala batu, berkemauan besar, gigih, dan mempunyai kecenderungan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Butir-butir watak demikian yang mengantarkan kepada Napoleon yang kemudian menugaskan dia yang satu-satunya marsekal non-Prancis untuk menguasai Jawa guna dijadikan pangkalan militer menghadapi Inggris.

Berdasarkan beberapa pernyataan ahli di atas, dapat digarisbawahi bahwa Herman Willem Daendels adalah perwira berpangkat Marsekal yang dilantik menjadi Gubernur Jenderal non-Perancis (Belanda) yang ditugaskan ke Hindia Belanda oleh Napoleon Bonaparte dan Louis Bonaparte pada tahun 1808-1811.

2.1.5 Teori Konflik

Pada hakikatnya konflik merupakan suatu pertarungan menang-kalah antar kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi. Atau dengan kata lain, konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Pertentangan kepentingan ini berbeda dalam intensitasnya tergantung pada sarana yang dipakai. Masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap mereka benar, dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun keras. Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan

manusia. Dari sudut mana pun kita melihat konflik, bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Didalam kenyataan kehidupan manusia dimana pun dan kapan pun selalu ada bentrokan sikap- sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu perubahan (Utsman dalam Rosana, 2015:2).

Konflik pada umumnya berlatarbelakang adanya perbedaan. Perbedaan sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi bisa menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif agar semakin memperkaya makna hidup. Bisa menjadi persoalan jika kemudian berkembang menjadi bentuk penyelesaian dengan cara-cara kekerasan. Konflik juga dapat bernilai positif, yaitu pada saat konflik bisa dikelola secara arif dan bijaksana, disini konflik bisa mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan, sehingga konflik bisa dikonotasikan sebagai sumber perubahan (Wahab, 2014:6).

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Rosana, 2015:217).

2.1.5.1 Jenis-Jenis Teori Tentang Konflik

Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori konflik yang berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori struktural fungsional, karena itu tidak mengherankan apabila preposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan preposisi yang terdapat dalam teori struktural fungsional. Menurut teori struktural fungsional memandang masyarakat dalam kondisi statis atau lebih tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut teori konflik malah sebaliknya. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Menurut teori struktural fungsional setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Kontras lainnya adalah bahwa penganut teori struktural fungsional melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh nilai-nilai, norma-norma, dan moralitas umum, maka teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan orang yang berkuasa (Ritzer dalam Rosana, 2015:218).

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari tapi juga dibutuhkan oleh masyarakat, karena konflik mempertegas identitas-identitas dalam kelompok dan membentuk dasar stratifikasi sosial. Walaupun teori konflik klasik pada dasarnya sudah tidak dapat digunakan untuk menganalisis fenomena konflik kontemporer, karena teori ini

diciptakan pada konteks kesejarahan yang berbeda dan perubahan struktur dan dinamika masyarakat telah diluar imajinasi para ilmuwan teori konflik klasik. Namun antara teori klasik dan teori kontemporer pada dasarnya sepakat bahwa konflik memainkan peran sentral dalam kehidupan karena mampu menjadi agen perubahan dan menjadi motor yang memobilisasi tindakan sosial. Konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat pula meklahirkan konflik. Pierre van den Berghe mengemukakan empat fungsi konflik yaitu :

1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
3. Mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi
4. Fungsi komunikasi.

Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti dimana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan leih tepat (Ritzer dalam Rosana, 2015:223). Berikut beberapa teori konflik yang peneliti jabarkan sebagai berikut:

a. Teori Kelas Karl Marx

Teori konflik yang terkenal adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx mengenai teori kelas. Eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus menerus akhirnya akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit dan melawan sehingga terjadilah perubahan social besar, yaitu revolusi sosial. Menurut Marx, bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. Sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai menggantikan pemilikan komunal atas kekuatan-kekuatan produksi. Karena itu, masyarakat terpecah menjadi dua kelompok: “yang memiliki” dan “yang tidak memiliki” kekuatan-kekuatan produksi menjadi kelas-

kelas sosial. Dalam masyarakat yang telah terbagi berdasarkan kelas tersebut, dapat mensub-ordinasikan kelas sosial lain dan memaksa kelompok tersebut untuk bekerja memenuhi kepentingan mereka sendiri. Kelas dominan menjalin hubungan dengan kelas-kelas yang tersubordinasi dalam sebuah proses eksploitasi ekonomi. Dalam hal ini, kelas-kelas yang tersubordinasi memberontak serta menuntut penghapusan hak-hak istimewa kelas dominan (Sanderson dalam Usman, 2003).

b. Teori Konflik Dahrendorf

Teori konflik lainnya adalah teori yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf yang mengemukakan bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan) atau wewenang (dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi) yang dinamakan "*Imperatively coordinated associations*" (asosiasi yang dikoordinasi secara paksa) karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda. Pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Dengan demikian, konflik menurut Dahrendorf merupakan sumber terjadinya perubahan sosial (Sunarto dalam Rosana, 2015:219). Pokok pikiran yang terkandung menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf adalah :

1. Setiap masyarakat manusia tunduk pada proses perubahan; perubahan ada dimana-mana
2. Disensus dan konflik terdapat dimana-mana
3. Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat
4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lain (Sunarto dalam Rosana, 2015:219).

c. Teori Konflik Lewis A. Coser

Teori konflik berikutnya yang juga mempengaruhi teori konflik dalam sosiologi adalah teori yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser. Menurut definisi kerja Coser konflik adalah perjuangan mengenai nilai tertentu atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Kajian Coser terbatas pada fungsi positif dari konflik, yaitu dampak yang mengakibatkan peningkatan dalam adaptasi hubungan sosial atau kelompok tertentu (Sunarto dalam Rosana, 2015:220).

2.1.5.2 Penyebab Konflik

Secara konseptual konflik merupakan pertentangan antara dua orang atau lembaga, yang disebabkan adanya perbedaan dalam mencapai kebutuhannya. Oleh sebab itu konflik merupakan kondisi dimana tidak ada kepercayaan antarpersonal maupun kelompok yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus, konflik terjadi karena adanya berbagai persepsi negative yang berkembang di dalam masyarakat. Anggota masyarakat diliputi suasana saling curiga, jika terus berkembang maka hal ini akan menimbulkan disharmona dan krisis relasi social. ketika telah terjadi krisis relasi social, sekiranya ada momentum apa lagi jika dibarengi dengan hadirnya provokator mempermudah timbulnya berbagai konflik, baik dalam bentuk penjarahan, perusakan, pembakaran, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Sementara itu, konflik tidak selalu bersifat negatif seperti diduga banyak orang. Apabila ditelaah secara seksama, konflik mempunyai fungsi positif yaitu sebagai pengintegrasian masyarakat dan sebagai sumber perubahan (Rosana, 2015:224).

Harus dibedakan antara konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan adalah hal yang berbeda, tidak semua konflik memiliki unsur kekerasan. Apabila dapat dikendalikan tidak serta merta konflik bermakna negatif, sebaliknya jika konflik berkembang semakin liar dapat dipastikan akan meningkat kedalam bentuk kekerasan. Dapat dikatakan konflik tidak

selamanya identik dengan kekerasan, namun kekerasan dapat terjadi disebabkan adanya konflik (Wahab, 2014:7).

Ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Salah satu diantaranya menyebutkan bahwa timbulnya konflik karena beberapa hal berikut :

1. Pertama, teori hubungan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
2. Kedua, teori negosiasi konflik. Teori ini menganggap bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
3. Ketiga, teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan social) yang tidak terpenuhi atau terhalangi.
4. Keempat, teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak selesai.
5. Kelima, teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara berkomunikasi antarberbagai budaya yang berbeda.
6. Keenam, teori transformasi konflik yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah- masalah social, budaya, dan ekonom (Fisher dalam Rosana, 2015:225).

Jika kita membicarakan konflik politik, maka akan dibedakan antara konflik yang positif dan konflik yang negatif :

1. Konflik positif; Konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan melalui mekanisme pengaturan konflik yang telah disepakati dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah

lembaga- lembaga demokrasi seperti partai politik badan perwakilan rakyat, pengadilan, pers, dll.

2. Konflik negatif; konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi (Surbakti dalam Rosana, 2015:225).

Kategorisasi ini mengandung kelemahan. Apabila mayoritas masyarakat memandang lembaga dan struktur yang ada tidak mencerminkan kepentingan umum maka konflik yang disalurkan melalui mekanisme politik justru dipandang sebagai konflik negatif. Sehubungan dengan konflik positif dan negatif, maka masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe yaitu :

1. Masyarakat yang mapan; artinya masyarakat yang memiliki dan mendayagunakan struktur kelembagaan yang diatur dalam konstitusi. Konflik yang dianggap positif dalam masyarakat ini berupa konflik yang disalurkan melalui struktur kelembagaan, sedangkan konflik yang negatif berupa tindakan yang menentang struktur yang ada dan disalurkan melalui cara-cara diluar struktur itu.
2. Masyarakat yang belum mapan; artinya masyarakat yang belum memiliki struktur kelembagaan yang mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Biasanya struktur kelembagaan yang diatur dalam konstitusi selain tidak didukung oleh sebagian masyarakat, juga belum berfungsi sebagaimana mestinya. Konflik yang dianggap positif dalam masyarakat ini acap kali justru konflik yang disalurkan melalui cara-cara diluar struktur kelembagaan yang ada karena dianggap lebih efektif (Surbakti dalam Rosana, 2015:226).

Pada dasarnya konflik terjadi karena adanya kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras, dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti buruh, tani, PNS, dan sebagainya. Sedangkan kemajemukan vertikal

adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan karena kemajemukan horizontal dan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan karena adanya fakta sejumlah masyarakat yang mau menerima perbedaan-perbedaan tersebut (Surbakti dalam Rosana, 2015:227).

2.1.5.3 Tokoh-Tokoh Teori Konflik

Tokoh-tokoh teori konflik terbagi ke dalam dua fase yakni tokoh sosiologi klasik dan tokoh sosiologi modern. Adapun tokoh-tokoh teori konflik sosiologi klasik adalah sebagai berikut (Bachtiar dalam Tualeka, 2017:35):

1. Polybus

Polybus lahir pada tahun 167 SM. Teori konflik yang dikemukakan oleh Polybus bertolak dari keinginan manusia membentuk suatu komunitas sehingga teori konflik yang dikemukakan polybus diformulasikan sebagai berikut: Monarki atau sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal adalah kekuasaan terkuat yang merupakan bentuk pertama komunitas manusia. Transisi dari sistem pemerintahan penguasa tunggal yang didasarkan pada kekuasaan atau kekuatan, kingship (negara dalam sebuah kerajaan) kepada kekuasaan yang didasarkan pada keadilan dan wewenang yang sah.

2. Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Abu Zaid'Abdul Rahman Ibn Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tahun 1332 Masehi. Ibnu Khaldun adalah Sosiolog sejati. Hal ini didasarkan pada pernyataannya tentang beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa sosial dan peristiwa-peristiwa sejarah. Prinsip yang sama juga dijumpai dalam analisis Ibnu Khaldun terhadap timbul dan tenggelamnya Negara-negara (Bachtiar dalam Tualeka, 2017:35).

3. Nicolo Machiavell

Nicolo Machiavelli adalah seorang berkebangsaan Italia (1469-1527). Menurut Machiavelli pada awalnya manusia hidup liar bagaikan binatang buas, ketika ras manusia semakin meningkat jumlahnya mulai dirasakan kebutuhan akan adanya hubungan dan kebutuhan pertahanan untuk menentang satu dengan yang lainnya dan memilih seseorang yang sangat kuat dan berani untuk dijadikan sebagai pemimpin mereka yang harus dipatuhinya. Kemudian mereka mengenal baik dan buruk dan dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat (Bachtiar dalam Tualeka, 2017:36).

4. Jean Bodin

Inti pemikiran Jean Bodin pada konsepsi titah kedaulatan sebagai esensi dari masyarakat sipil. Namun demikian, kedaulatan tidak pernah bisa dipisahkan dari prerogative formal. Hukum diperlakukan sebagai titah kedaulatan. Hukum adat dipandang sah apabila didukung oleh kedaulatan, karena kedaulatan memiliki wewenang tak terhingga untuk membuat hukum (Bachtiar dalam Tualeka, 2017:36)

5. Thomas Hobbes

Teori konflik yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes adalah bahwa pada dasarnya dorongan utama dari tindakan manusia diformulasikan sebagai berikut: pada tingkatan pertama manusia dengan keinginannya terus-menerus dan kegelisahannya akan kekuasaan setelah berkuasa, artinya rasa ingin berkuasa akan berhenti bilamana sudah masuk liang kubur. Hal ini terwujud dalam dua hal, seorang raja dan problematikanya karena keinginan untuk berkuasa adalah sesuatu hal yang tak pernah mengalami kepuasan (Bachtiar dalam Tualeka, 2017:36).

Adapun tokoh sosiologi modern yang mengemukakan tentang teori konflik adalah sebagai berikut:

1. Karl Marx

Karl Marx berpendapat bahwa Konflik kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum kapitalis dan proletar adalah sentral di masyarakat. Segala macam konflik mengasumsikan bentuk dari peningkatan konsolidasi terhadap kekacauan. Kaum kapitalis telah mengelompokkan populasi pada segelintir orang saja. Kaum borjuis telah menciptakan kekuatan produktif dari semua generasi dalam sejarah sebelumnya. Tetapi kelas-kelas itu juga berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat menjadi terpecah ke dalam dua kelas besar yaitu borjuis dan proletar. Dasar analisis kalangan marxis adalah konsep kekuatan politik sebagai pembantu terhadap kekuatan kelas dan perjuangan politik sebagai bentuk khusus dari perjuangan kelas. Struktur administratif negara modern adalah sebuah komite yang mengatur urusan sehari-hari kaum borjuis. Sebuah bagian dari produksi umum membuat jalan masa depan bagi konflik-konflik ini. Hal itu memperkirakan bahwa kelas menengah pada akhirnya akan hilang. Pedagang, perajin masuk ke dalam golongan proletar sebab modal kecil tidak dapat bersaing dengan modal besar. Sehingga proletar direkrut dari semua kelas populasi. Perbedaan antara kaum buruh/pekerja kemudian akan terhapus. Kaum pekerja akan memulai bentuk kombinasi. Konflik akan sering muncul di antara dua kelas ini. Kaum buruh memulainya dengan bentuk perlawanan koalisi borjuis agar upah mereka terjaga. Mereka membentuk perkumpulan yang kuat dan dapat memberikan dukungan kepada mereka ketika perjuangan semakin menguat. Bagian dari proletar dengan unsur-unsur pencerahan dan kemajuan, peningkatan potensial secara revolusioner.

2. Lewis A. Coser

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik

dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok (Cosser dalam Tualeka, 2017:37). Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Misalnya, pengesahan pemisahan gereja kaum tradisional (yang memertahankan praktik- praktik ajaran katolik pra-Konsili Vatikan II) dan gereja Anglo- Katolik (yang berpisah dengan gereja Episcopal mengenai masalah pentahbisan wanita). Perang yang terjadi bertahun-tahun yang terjadi di Timur Tengah telah memperkuat identitas kelompok Negara Arab dan Israel. Cosser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan- hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup Penyelamat (*savety-value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur. Menurut Cosser konflik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan.
2. Konflik Non-Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Cosser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembalasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain-lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan

pengkambing hitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Menurut Coser terdapat suatu kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistik tanpa sikap permusuhan atau agresi. Contoh: Dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa berteman erat. Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk saling berhadapan di meja hijau. Masing-masing secara agresif dan teliti melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah meninggalkan persidangan mereka melupakan perbedaan dan pergi ke restoran untuk membicarakan masa lalu. Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan- hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistik dan non-realistik) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa, semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan- hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan (Poloma dalam Tualeka, 2017:39). Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan- hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar- benar melampaui batas sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut. Contoh: Seperti konflik antara suami dan istri, serta konflik sepasang kekasih.

Coser (Tualeka, 2017:39) mengutip hasil pengamatan Simmel yang meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Dia menjelaskan bukti yang berasal dari hasil pengamatan terhadap masyarakat Yahudi bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat. Dalam struktur

besar atau kecil konflik in-group merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat. Coser sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian Coser menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan.

3. Ralf Dahrendorf

Bukan hanya Coser saja yang tidak puas dengan pengabaian konflik dalam pembentukan teori sosiologi. Segera setelah penampilan karya Coser, seorang ahli sosiologi Jerman bernama Ralf Dahrendorf menyadur teori kelas dan konflik kelasnya ke dalam bahasa Inggris yang sebelumnya berbahasa Jerman agar lebih mudah difahami oleh sosiolog Amerika yang tidak faham bahasa Jerman saat kunjungannya ke Amerika Serikat (1957-1958) (Dahrendorf dalam Tualeka, 2017:40). Dahrendorf tidak menggunakan teori Simmel melainkan membangun teorinya dengan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta memodifikasi teori sosiologi Karl Marx. Seperti halnya Coser, Ralf Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori tersebut merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Ralf Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama.

Ralf Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yakni konflik dan konsensus. Sehingga teori sosiologi harus dibagi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritis konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan tersebut. Dahrendorf mengakui bahwa terbentuknya sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari adanya dua unsur yakni konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lainnya. Meski ada hubungan timbal balik antara konsensus dan konflik, Dahrendorf tidak optimis mengenai pengembangan

teori sosiologi tunggal yang mencakup kedua proses itu. Dia menyatakan “Mustahil menyatukan teori untuk menerangkan masalah yang telah membingungkan pemikir sejak awal perkembangan filsafat barat”. Untuk menghindarkan dari teori tunggal tersebut, Dahrendorf membangun teori konflik Masyarakat (Ritzer, Goodman dalam Tualeka, 2017:40).

Dahrendorf mulai dengan dan sangat dipengaruhi oleh teori fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa, menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh konsensus bersama oleh kedua-duanya. Tetapi, menurut teoritis konflik bahwa masyarakat dipersatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis” (Tualeka, 2017:41).

Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena itu hanya ada dua kelompok konflik yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu. Di dalam setiap asosiasi, orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan *staus quo*, sedangkan orang yang berada dalam posisi subordinat berupaya mengadakan perubahan. Konflik kepentingan didalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Ini berarti legitimasi otoritas mulai terancam (Tualeka, 2017:41).

Ralf Dahrendorf kemudian memaparkan tentang kelompok, konflik dan perubahan. Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. Pertama adalah kelompok semu (*quasi group*) atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Kedua adalah kelompok kepentingan. Ketiga adalah kelompok konflik yang muncul dari berbagai kelompok kepentingan. Aspek terakhir teori konflik dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis A Coser yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Akan tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial, konflik juga mengakibatkan perubahan dan perkembangan. Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang melakukan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai dengan tindakan kekerasan maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba (Tualeka, 2017:42).

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dari persetujuan judul skripsi yaitu pada bulan Januari 2021 sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini pada bulan April 2022. Adapun kegiatan penelitian secara rinci tampak pada tabel berikut:

Tabel 2: Kegiatan Penelitian Skripsi

Kegiatan	B u l a n	2021												2022					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Pengajuan Judul		√																	
Pengajuan Proposal dan perijinan penelitian			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
Penelitian															√	√			
Analisis data																	√		
Penyusunan dan penyelesaian penulisan																		√	

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Reaksi Elit Agama Terhadap Kebijakan Politik Herman Willem Daendels Pada Bidang Ekonomi Di Cirebon Tahun 1808-1811”, dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka

dan turun ke lapangan untuk pengumpulan dokumen serta arsip. Adapun tempat yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kota Cirebon
2. Keraton Kanoman Cirebon
3. ANRI

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Objek : Reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811.
2. Ruang Lingkup Subjek : Pemerintahan Herman Willem Daendels di Cirebon tahun 1808-1811.
3. Ruang Lingkup Tempat : Kota Cirebon, Keraton Kanoman Cirebon, ANRI.
4. Ruang Lingkup Waktu : Tahun 2021.
5. Bidang Ilmu : Ilmu Sejarah.

3.3 Metode Penelitian

Metode adalah cara yang seharusnya ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Gottschalk dan Garraghan (Pranoto, 2014:11) metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek. Juga dikatakan bahwa metode adalah cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur. Jadi, metode selalu erat hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknik yang sistematis untuk melakukan penelitian disiplin tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan objek penelitian. Berdasarkan pendapat ahli yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara atau usaha seorang peneliti dalam suatu penelitian untuk memecahkan

suatu permasalahan yang disusun secara sistematis. Metode historis menurut Gottschalk, menyatakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Notosusanto, 1986:32). Metode penelitian historis merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasilnya (Notosusanto, 1984:48).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesisakan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Suryabrata, 1991:16).

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, dapat digaris bawahi bahwa metode penelitian historis adalah cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau disusun secara kronologis dan sistematis. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode historis, antara lain :

1. Heuristik, yaitu kegiatan menghimpin jejak-jejak masa lalu.
2. Kritik sumber (sejarah), yakni menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya.
3. Interpretasi, yakni menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh itu.
4. Historiografi, yakni penyampaian sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah (Notosusanto, 1984:36).

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka hal-hal yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Heuristik

Heuristik menurut terminologinya berasal dari bahasa Yunani *heuristiken* yaitu mengumpulkan atau menemukan sumber. Yang dimaksud dengan sumber sejarah (*historical sources*) adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan terdifersifikasi. Catatan, tradisi lisan, runtuan atau bekas-bekas bangunan prehistori, inskripsi kuno adalah sumber sejarah. Singkatnya setiap titik atau secercah apapun yang memberi penerangan bagi cerita kehidupan manusia dikategorikan sebagai sumber sejarah. Atau sumber sejarah itu dapat juga disebut tinggalan kehidupan manusia dan hasil aktivitas manusia yang dikomunikasikan (Pranoto, 2014:30). Peneliti mengumpulkan jejak-jejak sejarah, menulis sejarah tidak mungkin dapat dilakukan tanpa tersedianya sumber sejarah. Jika seseorang menulis tanpa sumber disebut mengarang. Dengan kata lain, orang harus mempunyai data lebih dulu untuk menulis sejarah. Kajian tentang sumber-sumber adalah suatu ilmu tersendiri yang disebut heuristik (Pranoto, 2014:30). Harus ada konsistensi antara tema dengan sumber yang dikumpulkan. Jenis-jenis sumber yaitu:

1. Sumber tertulis (dokumen)
2. Sumber lisan (oral)
3. Sumber tinggalan (artefak)
4. Sumber kuantitatif (penghitungan)

Peneliti ingin menulis tentang “Reaksi Elit Agama Terhadap Kebijakan Politik Herman Willem Daendels Pada Bidang Ekonomi Di Cirebon Tahun 1808-1811”. Sumber-sumber di atas tersedia semua. Sumber tertulis masih ada baik yang di simpan di ANRI maupun Rekso Pustoko. Surat, buku, foto, serta gambar dan lain sebagainya merupakan dokumen (bahasa Latinnya *docere* yang berarti mengajar). Dokumen menjadi tulang punggung penulisan sejarah sehingga seorang pakar mengatakan “*No document no history*”. Dari sisi sumbernya, peneliti menggunakan sumber primer, baik berupa arsip maupun surat-surat dan media informasi lainnya

yang sezaman. Sedangkan sumber sekunder juga diperlukan untuk mendukung, yakni dengan mencarinya pada literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen yang sesuai serta mampu menunjang dan relevan dengan penelitian ini. Penelitian dimulai dengan mencari serta mengumpulkan sumber sejarah, baik yang bersifat primer maupun sekunder pada ANRI dan Rekso Pustoko. Sumber primer meliputi arsip didapat dari ANRI dan Rekso Pustoko. Adapun sumber sekunder adalah hasil analisa terhadap sumber sejarah yang telah dilakukan pihak lain, baik berupa buku, dan jurnal ilmiah. Sebagai contoh beberapa sumber berupa buku yang dijadikan rujukan utama antara lain, yaitu: *De Cheribonsche Onlusten Van 1818 Naar Oorspronkelijke Stukken*, Indonesia Dalam Arus Sejarah: Kolonisasi Dan Perlawanan, *Baban Kana: Sejarah Pesantren Babakan Ciwaringin dan Perang Nasional Kedondong 1802-1919*. Peneliti telah mempertimbangkan keberadaan sumber dan kepantasan sumber untuk jenjang skripsi S1. Bahannya sesuai dan sumber tertulisnya masih ada.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Adapun caranya, yaitu dengan melakukan kritik. Yang dimaksud dengan kritik adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas suatu kejadian (Pranoto, 2014:35). Bekal utama seorang peneliti sejarah adalah sifat tidak percaya terhadap semua sumber sejarah. Peneliti harus lebih dulu mempunyai prasangka yang jelek atau ketidakpercayaan terhadap sumber sejarah yang tinggi. Peneliti sejarah mengejar kebenaran (*truth*). Kebenaran sumber harus diuji lebih dulu dan setelah hasilnya memang benar maka sejarawan baru percaya adanya *truth*. Peneliti harus membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Karena banyak terdapat sumber sejarah yang meragukan dan memang sengaja dipalsukan untuk mengecoh pendapat publik. Kritik merupakan produk proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan agar terhindar dari fantasi, manipulasi atau fabrikasi, sumber-sumber pertama harus dikritik. Sumber harus diverifikasi atau diuji kebenarannya dan diuji akurasinya atau

ketepatannya. Metodologi sejarah memikirkan bagaimana mneguji sumber-sumber itu agar menghasilkan fakta keras (*hard fact*). Dengan demikian sumber sejarah dapat digunakan dengan aman. Dalam hal ini yang selalu diingat bahwa sumber itu harus:

1. Dapat dipercaya (*credible*)
2. Penguatan saksi mata (*eyewitness*)
3. Benar (*truth*)
4. Tidak dipalsukan (*unfabricated*)
5. Handal (*reliable*)

Oleh karena itu, dalam penggunaan sumber, sejarawan harus mempertanggungjawabkan pengertian:

1. Otensitas (*authenticity*) atau asli (*genuine*) jika benar-benar produk dari orang yang dianggap pemiliknya. Asli dan otentik tidak sama artinya. Yang dimaksud sumber asli adalah sumber yang tidak dipalsukan. Sedangkan otentik adalah sumber yang dilaporkan dengan benar sesuai dengan keadaan senyatanya.
2. Kredibilitas (*credibility*).
3. Integritas (*Integrity*) (Pranoto, 2014:35).

Kritik di bagi lagi menjadi kritik eksternal dan internal:

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan otensitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik eksternal mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber. Otensitas mengacu pada materi sumber yang sezaman. Jenis-jenis fisik dari materi sumber, misalnya dokumen atau arsip adalah kertas dengan jenis, ukuran, bahan, kualitas, dan lain-lain (Pranoto, 2014:35). Dokumen ditulis dengan tangan atau diketik dengan mesin ketik atau komputer. Demikian pula dengan jenis tintanya apakah kualitas bagus, atau jenis isi ulang. Akan diragukan jika dikatakan dokumen pada masa 1808-1811, contohnya surat yang dikirimkan Raden Dipati Natadireja untuk Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels tanggal 25 Juli 1808 digunakan kertas HVS 80

gram berkualitas bagus, sebab pada waktu itu ada dalam kondisi perang dan semuanya serba mengalami penurunan kualitas serta belum modern dalam teknologi. Jadi, kritik eksternal adalah kritik yang sesuai dengan anak zaman.

b. Kritik Internal

Kritik internal adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan, dan lain-lain. Kritik internal ditujukan untuk memahami isi teks. Pemahaman isi teks diperlukan latar belakang pikiran dan budaya penulisnya. Mengapa demikian karena apa yang tersurat sangat berdeda dengan yang tersirat dalam teks itu. Oleh karena itu, untuk memahami yang tersirat diperlukan pemahaman dari dalam (*from within*). Isi teks sering *multiinterpretable*, bermakna ganda dan sering dimaksudkan sesuai dengan sudut pandang penulisnya. Dalam teks itu banyak hal yang tersembunyi dan tidak disampaikan dalam bahasa lugas, tetapi dalam bahasa tertutup dan penuh metafora. Tugas peneliti teks adalah membuka ketertutupan ini sehingga menghasilkan informasi terpercaya. Dengan kata lain, peneliti harus mampu membuka “amplop informasi” (Pranoto, 2014:37). Sebagai contoh dalam tahapan kritik sumber ini ialah mengkritisi dalam salah satu buku, dimana menurut buku “Indonesia Dalam Arus Sejarah, Kolonisasi Dan Perlawanan” dikatakan bahwa Residen di Cirebon melindungi petani dari penganiayaan dan pemaksaan semasa Herman Willem Daendels, sedangkan dalam buku Baban Kana: Sejarah Pesantren Babakan Ciwaringin dan Perang Nasional Kedondong 1802-1919, dikatakan bahwa para petani mendapatkan ketidakadilan dan pemaksaan semasa pemerintahan Herman Willem Daendels di Cirebon. Dari sini, peneliti sudah dapat mengetahui mana sumber yang dapat dipercaya kredibilitasnya. Dari data itu semua dapat menunjukkan fakta kepada peneliti tentang sumber mana yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan bagian yang cukup penting, karena lewat interpretasilah diperoleh sesuatu. Namun, interpretasi juga tergantung pada proses sebelumnya, yaitu kritik sumber yang menghasilkan fakta, dan juga sumber-sumbernya yang lebih merupakan awal dari segalanya. Jadi, tanpa penafsiran data yang dengan susah dikumpulkan tidak memberi informasi. Artinya data tinggal data. Interpretasi ada di tengah-tengah antara kritik dan ekposisi. Di satu pihak ia tidak mempunyai makna tanpa adanya kritik sumber lebih dulu. Di pihak lain ekposisi literer dari data sejarah sangat terkondisikan oleh interpretasi. Dalam hal ini interpretasi ada pada kritik dan eksposisi. Keduanya melakukan seleksi sendiri-sendiri. Selama ada campur tangan manusia maka sesuatu menjadi subjektif sifatnya, seperti halnya interpretasi. Subjektivitas merupakan kecenderungan tetapi harus dihindari. Metodologi menjadi saran untuk mengeliminasi subjektivitas. Interpretasi sumber meliputi:

1. Verbal
2. Teknikal
3. Logikal
4. Psikologikal
5. Faktual

Peneliti melakukan penafsiran berbagai fakta yang diperoleh untuk memperoleh makna dan penjelasan agar menjadi rangkaian yang logis setelah melakukan kritik sumber untuk selanjutnya dilakukan pembentukan konsep dan generalisasi sejarah (Pranoto, 2014:37). Sebagai contoh dalam tahapan ini ialah dari data-data berupa surat Raden Dipati Natadireja menunjukkan bahwa pribumi Cirebon seperti Raden Dipati Natadireja bekerjasama dengan pihak Herman Willem Daendels pada saat rakyat Cirebon menderita di bawah kebijakan Herman Willem Daendels. Dari fakta ini peneliti menafsirkan bahwa pribumi Cirebon seperti Raden Dipati Natadireja memanfaatkan moment dimana dia mendapatkan keuntungan dari bekerjasama dengan Herman Willem Daendels, tetapi

disisi lain ada rakyat-rakyat pribumi Cirebon yang menderita di bawah tekanan kebijakan politik Herman Willem Daendels. Penafsiran yang dimaksudkan peneliti yaitu fakta-fakta seperti inilah yang merupakan salah satu faktor yang memantik reaksi elit agama terhadap kebijakan Herman Willem Daendels di Cirebon. Pribumi-pribumi yang menjadi kolaborator Belanda tidak mempertimbangkan sesamanya yang mendapatkan dampak negatif dari kebijakan politik Herman Willem Daendels di Cirebon, mereka hanya memikirkan keuntungan demi diri mereka sendiri seperti Raden Dipati Natadireja.

4. Historiografi

Historiografi secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *histori* yang berarti sejarah dan *grafi* memiliki arti deskripsi/penulisan (Yatim, 1997:1). Kata *Historia* sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti Ilmu. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, kata "*historia*" dipakai untuk pemaparan mengenai tindakan-tindakan manusia yang bersifat kronologis terjadi di masa lampau (Lubis, 2000:11). Historiografi adalah seperangkat pernyataan-pernyataan tentang masa lampau, akan tetapi historiografi juga dapat memiliki arti lain yaitu sebagai sejarah perkembangan penulisan sejarah (Sjamsudin, 2007:8). Penulisan sejarah adalah puncak segala sesuatu. Sebab apa yang dituliskan itulah sejarah sebagai *historie-recite*, sejarah sebagaimana dikisahkan yang mencoba mengangkat dan memahami *historie-realtie*, sejarah sebagaimana terjadinya. Dan hasil penulisan inilah yang disebut historiografi (Surjomihardjo, 1985:15). Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyusunan hasil interpretasi dan merekonstruksi fakta menjadi sintesis kisah sejarah yang sistematis dan kronologis secara tertulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data/sumber dalam memperoleh sumber sejarah. Teknik pendukung dalam pengumpulan data penelitian ini adalah teknik studi pustaka dan teknik dokumentasi sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya koran, catatan-catatan, kisah-kisah sejarah, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1977:8). Teknik studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Nawawi, Martini, 2005:133). Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat digarisbawahi bahwa teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian, dimana peneliti melalui studi pustaka melakukan kajian yang berkaitan tentang teori-teori yang relevan melalui literatur-literatur terkait yang peneliti dapat di Perpustakaan Daerah Cirebon dan Perpustakaan Universitas Lampung untuk mendapatkan teori-teori maupun argumen yang dikemukakan oleh para ahli terkait yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Nawawi, Martini, 2005:134). Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, surat kabar, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1993:188). Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dengan menggunakan teknik dokumentasi peneliti berusaha untuk mengumpulkan

data yang berupa catatan-catatan (dokumen) yang relevan dengan masalah yang diteliti, antara lain dokumen berupa surat yang ditulis Raden Dipati Natadireja kepada Herman Willem Daendels dan Surat Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles yang berterima kasih kepada Pangeran Prangwedono, Pangeran Surianagara dan Pangeran Suryadipura dari Kadipaten Mangkunegaran yang telah membantu dalam meredam pemberontakan Bagus Rangin serta dokumen terkait lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah (Sjamsuddin, 1996:89). Hal ini berkaitan dengan interpretasi atau penafsiran sejarah, menurut Kuntowijoyo (Abdurrachman, 1999:64), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Menurut Berkhofer (Abdurrachman, 1999:64), analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat digarisbawahi bahwa analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu. Data yang telah diperoleh diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan penelitian. Analisis data merupakan langkah yang penting, dimulai dari melakukan kegiatan pengumpulan data kemudian melakukan kritik ekstern dan intern untuk mencari otensitas dan kredibilitas sumber

yang didapatkan. Dari langkah ini dapat diketahui sumber yang benar-benar dibutuhkan dan relevan dengan materi penelitian. Selain itu, membandingkan data dari sumber sejarah tersebut dengan bantuan seperangkat kerangka teori dan metode penelitian sejarah, kemudian menjadi fakta sejarah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Reaksi elit agama disebabkan karena penjualan tanah penduduk kepada orang Cina.
2. Reaksi elit agama disebabkan karena keberpihakan pejabat pribumi kepada Belanda.
3. Reaksi elit agama disebabkan karena kebijakan pemerintah Herman Willem Daendels yang menindas, tengah meresahkan masyarakat pribumi Cirebon.

Kompleksitas permasalahan inilah yang melatarbelakangi munculnya pemberontakan yang dipimpin oleh Bagus Rangin di Cirebon.

5.2 Saran

Saran dari penulis setelah terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811, ada baiknya agar menyempurnakan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini, karena masih banyak hal yang bisa dikaji lebih lanjut agar lebih memperjelas mengenai reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811. Saran bagi

Pembaca semoga tulisan ini mampu menjadi bahan bahasan dan menjadi bahan referensi untuk lebih menambah wawasan mengenai reaksi elit agama terhadap kebijakan politik Herman Willem Daendels pada bidang ekonomi di Cirebon tahun 1808-1811. Serta Bagi mahasiswa terutama untuk mahasiswa prodi Pendidikan Sejarah dapat dijadikan sumber bacaan yang bermanfaat dan sumber referensi dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atjeh, Aboebakar. 1957. *Sejarah Hidup K. H. A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*. Jakarta. Kemenag
- A. Schrieke. 1960. *Indonesian Sociological Studies*. Bandung Sumur Bandung
- Ali Muhammad. 1985. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung:Alfabeta.
- Amran, Rusli. 1986. *Padang, Riwayatmu Dulu*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya.
- Abdullah, Taufik. Surjomihardjo, Abdurachman. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*. Jakarta. Gramedia.
- Arikunto, Surhasimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta. Logos Wacana.
- Ahmad Jaiz, Hartono-Abdul Zulfidar Akaha. 2001. *Bila Kyai Dipertuhankan: Membedah Sikap Beragama NU*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Ambary, Hasan Muarif. 2001. *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Di Indonesia*. Ciputat. PT Logos Wacana Ilmu.
- Arif, Mahmud. 2008. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta. Lkis.
- Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Abdullah Taufik dan Lopian (alm.). 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah jilid 4*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve
- Amin, Zamzami, K.H., dkk. 2014. *Sejarah Pesantren Babakan Ciwaringin dan Perang Nasional Kedondong 1802-1919*. Bandung: Humaniora

- Amin Khairul. 2017. *Elit dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa*. Jurnal Sosiologi USK. Vol 11.
- Aprita, Serlika. Adhitya, Rio. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok. Rajawali Pers.
- Adnan, Gunawan. 2020. *Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan*. Banda Aceh. At-raniry Press.
- Arifin, H. Hm. Tanpa Tahun. *Kapita Selecta Pendidikan (Umum dan Agama)*. Semarang. CV. Toha Putra.
- Boulger, Demetrius Charles. 1897. *The Life Of Sir Thomas Stamford Raffles*. London. Horace Marshall & Son.
- Benda, Harry J. 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta. PT Dunia Pustaka Jaya.
- Bruinessen, Martin van. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung. Mizan.
- Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Clausewitz, Carl Von. 1832. *Vom Kriege (On War)*. Edited and Translated by Michael Howard and Peter Paret. 1989. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.
- Coser, Lewis. 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Coser, Lewis. 1967. *Continuities in the Study of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Carey, Peter. 2011. *Kuasa Ramalan, Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855*, jilid 1. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Carey, Peter. 2013. "Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811: Hubungan Politik, Seragam dan Jalan Raya Pos". Dalam Kuliah Khusus Tentang Daendels (*Daendelslezing*) untuk Yayasan Daendels (*Strichting Daendels*) di Felix Meritis Keizergracht, Amsterdam. Amsterdam.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Calif.: Stanford University Press.

- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Yogyakarta. LP3ES
- Daliman, A. 2017. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX, Sistem Politik Dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda*. Yogyakarta. Ombak.
- Ekadjati, Edi. S. (dkk.). 1990. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonial di Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, dan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Fisher, Simon. 2000. *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta. British Council
- Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah, (diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto)*. Jakarta. Yayasan Penerbit UI.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah (Terjemahan)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2008. *Modern Sociological Theory, 6th Edition*, Jakarta: Kencana.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta. P3M.
- Haidar, Ali. 1998. *Nahdlatul Islam dan Ulama di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta. Gramedia.
- Iskandar, Yoseph. 1990. *Bagus Rangin*. Bandung: Perpustakaan Kebudayaan Sunda Universitas Padjajaran.
- Ihsan, Bakir. Nurhayati, Cucu. 2020. *Agama, Negara, Dan Masyarakat: Tokoh Agama Di Tengah Politik Identitas Kota*. Jakarta. HAJA Mandiri
- Koentjaraningrat, 1977, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia.
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa Dan Kelompok Elite: Peranan Elite Penentu Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta. Rajawali
- Koentjaraningrat. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta. Dian Rakyat
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta. Mata Bangsa.

- Lubis, Nina Herlina. 2000. *Historiografi Barat. Bandung*. Satya Historika.
- Martanagara, R.A.A. 1978. *Babad Sumedang*, edisi Said Raksakusumah dan Edi S. Ekadjati.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lalu, Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI-XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulkan, A. Munir. 1986. *Perubahan Prilaku Politik Dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*. Jakarta. Rajawali Press
- Mohammad Nasir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchtar, M. Nadjid. 1988. *Konsep Ulama Dalam Islam Dan Pemikiran tentang Kedudukannya Dalam Lingkungan NU*. Jakarta. Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Margaret. M. Poloma. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Mughni, Syafiq. 2002. *Dinamika Intelektual Islam Pada Abad Kegelapan*. Surabaya. Ipam
- Marihandono, Djoko. “*Daendels dalam Naskah dan Cerita Rakyat: Cerita yang Berkaitan dengan Daendels di Pantai Utara Jawa*”. Makalah disajikan dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2—5 Oktober 2003.
- Mas’ud, Abdurrahman. 2004. *Intelektual Pesantren*. Yogyakarta. LKIS
- Mochtar, H. Affandi. 2009. *Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pesantren*. Bekasi. Pustaka Isfahan.
- Mulyana Agus dan Purnaningsih Herni. 2017. *Perlawanan Bagus Rangin: Perang Nasional Yang Terlupakan*. FACTUM. Vol 6.
- Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Modern Dalam Islam Di Indonesia 1900-1942*.
- Nawawi, Hadari. Martini, Mimi. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Nurhata. 2015. *Babad Darmayu: Pemberontakan Bagus Rangin Di Indramayu Pada Awal Abad Ke 19*. Padhaku Indramayu. STKIP Padhaku Indramayu

- Omi Busytoni, *Dakwah Dan Perjuangan Ulama Cirebon*, (Cirebon, 2013).
- Parsons, Talcott. 1966. *Societies; Evolutionary And Comparative Perspective*. Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall.
- P. H. Van Der Kemp. 1979. *Pemberontakan Cirebon Tahun 1818*. Jakarta. Yayasan idayu
- Pusponegoro, Marwati Djanoed dan Notosusanto, Nugroho. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia IV. Kemunculan Penjajahan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranoto, Suhartono W. 2014. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Pratiwi, Indah. 2021. *Kebijakan Politik belanda Pada Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels Di Cirebon Tahun 1808-1811*. Bandar Lampung. Universitas Lampung
- Qoyim Isma'il, Ibnu. 1997. *Kiai Penghulu Jawa*. Jakarta. Gema Insani press
- Raffles, Thomas Stamford. 1814. *Substance of a Minute Recorded by The Honourable Thomas Stamford Raffles, Lieutenant-Governor of Java and its Dependencies, on the 11th February 1814; on the introduction of an Improved System of Internal Management and the establishment of a Land Rental*. London: Black, Parry and Co
- Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta. Rajawali
- Rauf, La Ode Abdul. 1987. *Peranan Elite Dalam Proses Modernisasi*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Rahardjo, Supratikno. 1998. *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta. Depdikbud RI.
- Rahardiansah, Trubus. 2005. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta. Universitas Trisakti
- Rickfels, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200—2004*. Jakarta: Serambi.
- Riris K. Toha dan Melani Budianta. 2010. *Rona Budaya*. Jakarta:IKAPI
- Restu Kartiko Widi. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosana, Ellya. 2015. *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*. Al-AdYaN/Vol.X.No2/Juli-Desember/2015

- Rahayu Islamiati. 2016. *Strategi-strategi perlawanan rakyat Cirebon dalam perang Kedondong tahun 1802-1818 M.* Tamadun: Vol. 4
- Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Cirebon Tahun 2017-1022*
- Stevens, Th. 1978 “*Cirebon at the beginning of the Nineteenth Century: an Analysis of Reaction from a Javanese Sultanate to the Economic and Political Penetration of the Colonial Regime Between 1797-1816*” dalam *Papers of the Dutch-Indonesian Historical Conference, held at Noordwijkerhout, the Netherlands: Leiden/Jakarta: the Bureau of Indonesian Students under the Auspices of the Dutch and Indonesian Steering Committees of the Indonesian Studies Program*
- Schoorl, J. W. 1980. *Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang.* Jakarta. Gramedia.
- Siddiq, Achmad. 1980. *Khittah Nahdliyah.* Surabaya. Balai Pustaka
- Steenbrink, Karel. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah.* Jakarta. LP3ES
- Suryabrata, Sumadi. 1991. *Metodologi Penelitian.* Jakarta. Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. Kosoh dkk. 1994. *Sejarah Daerah Jawa Barat.* Jakarta: CV Dwi Jaya Karya.
- Suprayogo, Iman. 1998. *Kiai Politik, Kiai Advokatif, Kiai Spiritual,* Disertasi Universitas Airlangga.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta. Grasindo
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif. Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama.* Bandung. Mizan
- Suroyo, A.M. Djuliaty. 2000. *Eksplorasi Kolonial Abad XX: Kerja Wajib di Karesidenan Kedu 1800—1890.* Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2002. *Psikologi Sosial “Individu dan teori-teori psikologi sosial”.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Universitas Lampung: PT. Bandar Lampung.
- Sunarto, Kamanto. 2004, *Pengantar Sosiologi.* Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- Subagyo Joko. 2006. *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- Supramono Nanang. 2008. *Peran Bagus Rangin Dalam Pemberontakan Rakyat Cirebon Tahun 1802-1818*.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta. Kencana
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Situmorang, Abdul Wahid. 2013. *Gerakan Sosial:Teori dan Praktik*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sarmauli. 2015. *PERSAUDARAAN LINTAS IMAN: Relasi Legitimasi dan Identitas Elit Agama Kota Palangka Raya*. Al- Qalam: Vol. 21
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Siti Nur Masitoh. 2018. *Reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati Terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer pada Masa Kabinet Hatta tahun 1948*. Bandar Lampung.
- Syafaah, Aan. 2020. *Memahami Bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat dalam Perang Kedondong (1802-1811M)*. Tamaddun:Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 8 Issue 2, Desember 2020.
- Toha, Muchammad. *Elite Agama Dalam Masyarakat Jawa: Kajian Pengembangan Materi Diklat Kader Muballigh*
- Toer, Pramoedya Ananta. 2005. *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Tendi. 2016. *Islam Dalam Perjuangan Bagus Rangin Melawan Pemerintah Kolonial Belanda-Perancis Dan Inggris, 1810-1812*. Pascasarjana UI.
- Tualeka, Muhammad Wahid Nur. 2017. *Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern*. Surabaya. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Untung, Moh. Slamed. 2013. *Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren*. Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan. FORUM TARBIYAH Vol. 11, No. 1, Juni
- Wertheim, W. F. 1959. *Indonesian Society in Transition*. W. Van Hoeve Gravenhage: N. V. Uitgeverij.
- Wertheim, W. F. 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Tradisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Wafiyah. 2014. *Prioritas Dakwah Pada Masa Penjajahan Belanda Di Indonesia*. Semarang. UIN Walisongo. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No. 2, Juli-Desember 2014 ISSN 1693-8054
- Wahab, Abdul Jamil. 2014. *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Jakarta. Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia
- Yatim, Badri. 1997. *Historiografi Islam*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu.
- Yusron. 2009. *Elite Lokal dan Civil Society: Kediri di tengah Demokratisasi*. Jakarta. LP3ES.
- Yoyon . 2018. *Gerakan Islam Kebangsaan Mbah Muqayyim; Kajian Historis Relasi Keraton Kanoman dan Pesantren Buntet Cirebon. Mozaic Islam Nusantara*. Vol. 4
- Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta. P3M.
- Zuhdi, Zuhdi. 1996. *Hubungan Pelabuhan Cirebon Dengan Daerah Pedalaman: Suatu Kajian Dalam Kerangka Perbandingan Dengan Pelabuhan Cilacap 1880-1940, Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. Jakarta. Depdikbud RI.